

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia penelitian dan akademik untuk merujuk pada tinjauan atau penelaahan terhadap berbagai pustaka, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sumber – sumber lainnya yang relevan dengan topik atau masalah yang ingin diteliti.

Kegiatan kajian pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkini dan terpercaya tentang topik yang akan diteliti. Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk memahami status terkini pengetahuan tentang topik tersebut, melihat perkembangan yang terjadi, dan mengidentifikasi kesenjangan atau celah pengetahuan yang dapat diisi melalui penelitian baru.

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu upaya peneliti dalam rangka mencari bandingan dalam suatu penelitian. Kajian penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam memposisikan serta menunjukkan orisinalitas sebuah penelitian. Kajian penelitian terdahulu juga dapat membantu peneliti untuk menemukan inspirasi baru

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik analisis
1.	Euis Hasmita Putri (Hasmita et al., 2017)	Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Pelaku Ekonomi di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda)	Aspek – aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010 : 13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek – aspek antara lain : 1. Aspek tugas atau fungsi 2. Aspek rencana atau program 3. Aspek ketentuan dan peraturan 4. Aspek tujuan atau kondisi ideal	Penulis menggunakan pendekatan deskriptif.	Pada penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Pelaku Ekonomi di Kota Samarinda, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif	Teknik Analisis pengumpulan data yaitu model interaktif yang terdiri dari kondesasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
2.	Muhamma d Qurtubi, Muhtadi (Di et al., 2024)	Efektivitas Program Permodalan Jakpreneur Dalam Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Di Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan	Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Mardikanto dan Soebianto : 1. Bina Manusia 2. Bina Usaha 3. Bina Lingkungan 4. Bina Kelembagaan	Pendekatan Deskriptif	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Teknik Analisis Data yaitu dengan Metode pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dengan reduksi data, dan verifikasi atau kesimpulan data
3.	Ainaa Maulidya Zahra, Novie Indrawati Sagita	Efektivitas Program Jakarta Enterepreneur (Jakpreneur) dalam Pemberdayaan	Teori efektivitas program menurut Subagyo dalam (Budiani, 2007)terdapat 4 (empat) indikator untuk meninjau sejauh mana	Pendekatan deskriptif kualitatif	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Teknik analisis data yang digunakan meliputi teknik pengumpulan data dengan melakukan studi lapangan dan studi pustaka, teknik informan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik analisis
	(Maulidya et al., n.d.)	an Pelaku Ekonomi di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara	program sudah berjalan secara efektif yaitu: 1. ketepatan sasaran, 2. sosialisasi program, 3. pencapaian tujuan, 4. pemantauan program			menggunakan purposive untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013).
4.	Nasrin Nasrin, Ermawati Ermawati, Uswatun Hasanah (Nasrin et al., 2019)	Efektivitas Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM–Mandiri) Dalam Pengembangan Pelaku ekonomi DiDesa Lakea II Kabupaten Buol	Teori efektivitas pelaksanaan program menurut Haris (2010) terdapat 4 indikator yaitu : 1. tingkat kualitas, 2. tingkat kuantitas, 3. tingkat dampak dan 4. tingkat waktu.	Teknik kualitatif dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM–Mandiri) Dalam Pengembangan Pelaku ekonomi DiDesa Lakea II Kabupaten Buol	Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui teknik observasi langsung, wawancara mendalam, dan data yang bersumber dari dokumen. Kemudian data di analisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi melalui teknik triangulasi.
5.	Mohammad Alvin Naami, Mei Maemunah (Maohammad et al., n.d.)	Efektivas Program Sibakul Jogja dalam Pemberdayaan Mitra Pelaku Ekonomi di Yogyakarta	Teori efektivitas program model Cambell J.P yaitu dengan dilihat dari variabel indikator 1. keberhasilan program, 2. pencapaian tujuan secara menyeluruh, 3. keberhasilan sasaran, 4. kepuasan terhadap program, 5. tingkat input dan output.	Pendekatan deskriptif kualitatif	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Teknik analisis data yang digunakan meliputi teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi studi literatur.

Pada penelitian pertama Penelitian yang dilakukan oleh Euis Hasmita Putri (2017) dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Pelaku Ekonomi di Kota Samarinda” mengkaji efektivitas program berdasarkan teori efektivitas Muasaroh (2010). Teori ini menjelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat diukur melalui empat aspek utama, yaitu aspek tugas atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan dan peraturan, serta aspek tujuan atau kondisi ideal. Dengan kata lain, suatu program dikatakan efektif jika mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, memiliki rencana yang terstruktur, mematuhi ketentuan yang berlaku, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan Pelaku Ekonomi melalui pelatihan, pemberdayaan, pembinaan, sosialisasi, serta pengawasan terhadap para pelaku usaha. Namun, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini, seperti minimnya dana yang menghambat penyelenggaraan pelatihan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan program, kurangnya kemampuan teknis dalam produksi dan manajemen usaha, serta kesulitan pemasaran yang dialami oleh para pelaku ekonomi. Kendala – kendala ini menjadi tantangan utama dalam meningkatkan efektivitas program dan perlu mendapatkan perhatian lebih agar program pengembangan pelaku ekonomi dapat berjalan optimal di Kota Samarinda.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu oleh Euis Hasmita Putri (2017) terletak pada fokusnya dalam mengukur efektivitas program pemberdayaan pelaku ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Kedua

penelitian ini sama – sama menggunakan teori efektivitas untuk menilai keberhasilan program yang diterapkan. Jika penelitian Putri (2017) menyoroiti efektivitas Program Pengembangan Pelaku Ekonomi di Kota Samarinda berdasarkan empat aspek efektivitas menurut Muasaroh (2010), penelitian ini menganalisis efektivitas Program Partakomala di Kota Bandung dengan indikator yang serupa, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan, dan pemantauan program. Selain itu, kedua penelitian mengungkap kendala dalam implementasi program, seperti keterbatasan anggaran, minimnya literasi digital, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku ekonomi, yang menjadi tantangan utama dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan pelaku ekonomi di masing – masing daerah.

Pada penelitian kedua yang Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Qurtubi dan Muhtadi (2024) berjudul "Efektivitas Program Permodalan Jakpreneur Dalam Pemberdayaan Pelaku Ekonomi di Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan" mengkaji efektivitas program berdasarkan teori pemberdayaan pelaku ekonomi dari Mardikanto dan Soebianto. Teori ini mencakup empat aspek utama, yaitu Bina Manusia, yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi, Bina Usaha, yang berfokus pada pengembangan usaha melalui pelatihan dan pendampingan; Bina Lingkungan, yang mencakup dukungan lingkungan usaha yang kondusif; serta Bina Kelembagaan, yang bertujuan untuk memperkuat sistem kelembagaan pelaku ekonomi agar lebih berdaya saing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Permodalan Jakpreneur terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi di Kecamatan

Pesanggrahan. Program ini memberikan dampak nyata, seperti peningkatan omzet, akses pasar yang lebih luas, serta keberlanjutan usaha yang lebih baik. Selain itu, program ini juga berhasil memperluas jaringan usaha dan memperkuat kelembagaan pelaku ekonomi, sehingga pelaku usaha memiliki daya saing yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Program Jakpreneur mampu membawa perubahan positif yang signifikan bagi pelaku ekonomi, baik dari segi ekonomi, pengelolaan usaha, maupun keberlanjutan bisnis mereka.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu oleh Muhammad Qurtubi dan Muhtadi (2024) terletak pada fokusnya dalam mengukur efektivitas program pemberdayaan Pelaku Ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Jika penelitian Qurtubi dan Muhtadi (2024) menganalisis efektivitas Program Permodalan Jakpreneur berdasarkan empat aspek pemberdayaan pelaku ekonomi dari Mardikanto dan Soebianto (Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan), penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas Program Partakomala di Kota Bandung dengan menilai ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan, serta pemantauan program. Kedua penelitian ini menyoroti dampak program terhadap keberlanjutan usaha, akses pasar, serta daya saing pelaku ekonomi di wilayahnya masing – masing. Selain itu, baik Jakpreneur maupun Partakomala menghadapi kendala dalam implementasi, seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, dan tantangan dalam pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku ekonomi

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ainaa Maulidya Zahra dan Novie Indrawati Sagita (2023) berjudul "Efektivitas Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) dalam Pemberdayaan Pelaku Ekonomi di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara" menilai efektivitas program berdasarkan teori dari Subagyo dalam Budiani (2007). Teori ini menggunakan empat indikator utama untuk mengukur efektivitas program, yaitu ketepatan sasaran, yang memastikan program menjangkau pelaku ekonomi yang membutuhkan; sosialisasi program, untuk melihat seberapa baik informasi mengenai program disebarluaskan; pencapaian tujuan, yang menilai keberhasilan program dalam mencapai targetnya; serta pemantauan program, yang berfungsi untuk mengevaluasi dan memperbaiki implementasi program agar lebih optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Jakpreneur telah berjalan dengan baik, terutama dalam menyediakan fasilitas pendukung usaha yang bermanfaat bagi perkembangan pelaku ekonomi. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, seperti minimnya ketertarikan anak muda untuk bergabung dengan Jakpreneur, rendahnya kesediaan pelaku ekonomi untuk menyelesaikan pelatihan, kurangnya daya saing produk usaha, ketidakmandirian pelaku ekonomi dalam menggunakan sistem Jakpreneur untuk pelaporan keuangan, serta kesulitan akses permodalan akibat penolakan dari bank. Meskipun program ini sudah memberikan manfaat bagi para pelaku ekonomi, beberapa aspek tersebut masih menjadi tantangan dalam implementasi program di Kecamatan Penjaringan.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu oleh Ainaa Maulidya Zahra dan Novie Indrawati Sagita (2023) terletak pada penggunaan

indikator efektivitas program yang sama, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan, dan pemantauan program. Jika penelitian Zahra dan Sagita menilai efektivitas Program Jakpreneur di Kecamatan Penjaringan, penelitian ini mengkaji efektivitas Program Partakomala di Kota Bandung dengan pendekatan yang serupa. Kedua penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun program pemberdayaan pelaku ekonomi telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha, terdapat kendala dalam implementasi, seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya tingkat partisipasi pelaku ekonomi dalam pelatihan, serta kesulitan dalam mengakses fasilitas pendukung usaha. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas program pemberdayaan pelaku ekonomi sangat bergantung pada keberlanjutan sosialisasi, pemantauan, serta dukungan teknis bagi pelaku usaha agar mereka dapat memanfaatkan program secara optimal.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nasrin Nasrin, Ermawati Ermawati, dan Uswatun Hasanah (2019) berjudul "Efektivitas Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM – Mandiri) Dalam Pengembangan Pelaku Ekonomi di Desa Lakea II Kabupaten Buol" menilai efektivitas program berdasarkan teori Haris (2010). Teori ini mengukur efektivitas pelaksanaan program dengan empat indikator utama, yaitu tingkat kualitas, yang mencerminkan mutu pelaksanaan program, tingkat kuantitas, yang melihat cakupan penerima manfaat; tingkat dampak, yang mengukur pengaruh program terhadap penerima manfaat; dan tingkat waktu, yang menilai ketepatan waktu dalam implementasi program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PNPM – Mandiri berhasil meningkatkan pengembangan pelaku ekonomi serta kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Lakea II. Pemberian bantuan modal usaha kepada p pelaku ekonomi terbukti berdampak positif bagi hampir 90% penerima manfaat, membantu mereka mengembangkan usaha kecil dan menengah secara lebih berkelanjutan. Pemerintah setempat, khususnya Pemerintah Desa Lakea II, memiliki peran aktif dalam memantau dan mengevaluasi penggunaan modal usaha, memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Dengan adanya pengawasan yang ketat, program ini menjadi lebih efisien dalam membantu masyarakat meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu oleh Nasrin Nasrin, Ermawati Ermawati, dan Uswatun Hasanah (2019) terletak pada fokusnya dalam menilai efektivitas program pemberdayaan pelaku ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah. Jika penelitian mereka meneliti efektivitas Program PNPM – Mandiri dalam mengembangkan pelaku ekonomi di Desa Lakea II berdasarkan teori Haris (2010) dengan empat indikator utama (tingkat kualitas, tingkat kuantitas, tingkat dampak, dan tingkat waktu), penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas Program Partakomala di Kota Bandung dengan menilai ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan, serta pemantauan program. Kedua penelitian ini menyoroti dampak program terhadap keberlanjutan usaha dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, baik PNPM – Mandiri maupun Partakomala menghadapi kendala dalam implementasi, seperti

keterbatasan sumber daya, minimnya pengawasan yang sistematis, serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pemantauan program, yang menjadi tantangan utama dalam meningkatkan efektivitas pemberdayaan pelaku ekonomi.

Pada penelitian yang Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Alvin Naami dan Mei Maemunah (2024) berjudul "Efektivitas Program Sibakul Jogja dalam Pemberdayaan Mitra pelaku ekonomi di Yogyakarta" mengukur efektivitas program berdasarkan model efektivitas program Cambell J.P. Model ini menilai efektivitas program dengan lima indikator utama, yaitu keberhasilan program, yang melihat sejauh mana program mencapai targetnya; pencapaian tujuan secara menyeluruh, yang menilai keberhasilan dalam memenuhi misi utama program; keberhasilan sasaran, yang memastikan program tepat sasaran dalam membantu pelaku ekonomi, kepuasan terhadap program, yang mengukur bagaimana penerima manfaat menilai program; serta tingkat input dan output, yang menilai sumber daya yang digunakan dibandingkan dengan hasil yang dicapai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sibakul Jogja telah berjalan dengan efektif dalam mendukung pemberdayaan pelaku ekonomi di Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya seluruh indikator efektivitas program, termasuk keberhasilan dalam mencapai tujuan, kepuasan peserta, serta peningkatan input dan output dalam pelaksanaan program. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi studi literatur, yang membantu mengkonfirmasi keberhasilan program berdasarkan pengalaman para pelaku ekonomi yang terlibat. Dengan pencapaian ini, Program Sibakul Jogja terbukti mampu memberikan dampak positif bagi pengembangan pelaku ekonomi,

meningkatkan daya saing mereka, serta memberikan manfaat yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu oleh Mohammad Alvin Naami dan Mei Maemunah (2024) terletak pada pendekatan yang digunakan dalam mengukur efektivitas program pemberdayaan pelaku ekonomi. Jika penelitian mereka menggunakan model efektivitas program Campbell J.P. yang mencakup lima indikator utama, yaitu keberhasilan program, pencapaian tujuan secara menyeluruh, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, serta keseimbangan antara input dan output, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas Program Partakomala di Kota Bandung dengan indikator yang serupa, seperti ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan, dan pemantauan program. Kedua penelitian ini berfokus pada dampak program terhadap keberlanjutan pelaku ekonomi serta tingkat kepuasan penerima manfaat. Selain itu, baik Program Sibakul Jogja maupun Partakomala menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan daya saing UMKM, namun masih menghadapi tantangan dalam hal optimalisasi sumber daya, sosialisasi program, serta evaluasi keberlanjutan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas oleh pelaku ekonomi.

2.1.2 Kajian Terhadap *Grand Theory*

Grand theory merupakan suatu konsep yang menghubungkan dunia sosial dalam masyarakat dengan peristiwa – peristiwa menurut alur yang terekam dalam karya ilmiah para peneliti. Ini adalah sistem teoretis yang dirumuskan untuk menjadi teori rentang menengah tingkat berikutnya Grand theory menjadi landasan

munculnya teori – teori lain, dan merupakan teori luas yang kemudian dirumuskan menjadi tingkatan selanjutnya. Penting untuk diketahui bahwa grand theory bukanlah definisi variabel, melainkan teori utama yang mendasari penelitian Administrasi publik menjadi landasan teori secara umum yang kemudian akan berkaitan dengan teori dari intisari kajian lain yang lebih rinci mengenai pengawasan.

2.1.2.1 Pengertian Administrasi

Secara etimologis administrasi berasal dari bahasa Inggris dari kata *administration* yang bentuk infinitifnya adalah *to administer*. Dalam Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (1974), kata *to administer* diartikan sebagai *to manage* (mengelola) atau *to direct* (menggerakkan). Kata administrasi juga dapat berasal dari bahasa Belanda dari kata *administratie* yang mempunyai pengertian yang mencakup *stelsmatige verkrijging en verwerking van gegeven* (tata usaha), *bestuur* (manajemen dari kegiatan – kegiatan organisasi), dan *beheer* (manajemen dari sumber daya, seperti finansial, personel, gudang). Istilah, pengertian dan hakikat administrasi di Indonesia pada mulanya berasal dari Eropa Barat atau Eropa Kontinental melalui penjajahan Belanda (Belanda merupakan salah satu negara Eropa Kontinental).

Secara etimologis administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi, mengelola manusia, mengelola harta benda ke arah suatu tujuan yang terhimpun dalam sebuah organisasi. Tugas administrator adalah melayani atau menaati, melaksanakan *administrate* atau tata usaha

(registrasi, dokumentasi, inventarisasi atau pencatatan harta kekayaan dan kegiatan – kegiatan yang dilakukan).

Administrasi secara arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan, data, dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan lain. Data dan informasi yang dimaksud berhubungan dengan aktivitas organisasi, baik untuk kepentingan intern maupun ekstern, administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut sebagai tata usaha (*clerical work, office work*). Berikut dikemukakan beberapa arti administrasi dalam arti sempit atau tata usaha.

“tata usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian (*the headling*) informasi” (Pradjudi Atmosudirjo, 1980).

Sedangkan menurut J. Wajing, 1962 menyatakan bahwa kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tatusaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan.

Menurut Ali Mufiz yang menguti pendapat Munawardi Reskohadiprawiro, 1984 menyatakan bahwa :

“administrasi berarti tatusaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta – fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta lainnya”

Oleh karena itu kegiatan tatusaha merupakan pengelolaan data dan informasi yang keluar dari dan masuk ke organisasi. Maka keseluruhan rangkaian kegiatan – kegiatan tersebut terdiri atas penerimaan, pencatatan, pengklasifikasian,

pengolahan, penyimpanan, pengetikan, penggandaan, pengiriman informasi dan data secara tertulis yang diperlukan oleh suatu organisasi.

Hakikat dan arti administrasi sebenarnya sangat luas seperti yang dikembangkan oleh para pelopor teori administrasi, seperti Henry Fayol. Sesungguhnya administrasi berhubungan dengan kegiatan kerja sama yang dilakukan manusia atau kelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Semua aktivitas kehidupan manusia, apalagi jika aktivitas kehidupan manusia tersebut memerlukan bantuan orang lain, selalu dijumpai sekelompok orang – orang yang melakukan kerja sama yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan

Pengertian administrasi secara luas dapat dilihat dari beberapa para ahli yang mengemukakannya. Diantaranya :

Pengertian Administrasi menurut The Liang Gie yang dikutip oleh Ulbert (2009:9) mengatakan :“Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu”.

Menurut Sondang P.Siagian yang dikutip oleh Ulbert (2009:9) mengemukakan :

“Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Sedangkan menurut Leonard D. White yang dikutip oleh Ulbert (2009:10)

mengemukakan :

“Administrasi adalah proses yang umumnya dijumpai di semua kegiatan–kegiatan kelompok, baik publik (Negara, pemerintah) maupun privat (swasta, perusahaan), sipil atau militer dalam ukuran besar atau kecil”.

Menurut Ordway Tead (1954) dalam Ulbert (2009:10) menfinisikan bahwa

:

“ *Administration is conceived as the necessary activities of these individuals (executives) in organization who are change whit ordering, forwarding, and facilitating the associate efforts of group of individuals brought together to realize certain defined purpose* (administrasi adalah meliputi kegiatan – kegiatan individu – individu (eksekutif) dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan, dan menyediakan fasilitas usaha kerja sama sekelompok individu – individu untuk merealisasikan tujuan yang ditentukan.”

Dalam Susi Ratnawati, dkk (2022) terdapat beberapa pengertian dasar

mengenai administrasi, sebagai berikut :

- a. Luther Gullick : *Administration has to do with getting thing done woth the accomplishment of defined objectives.* (administrasi bertalian dengan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan untuk mencapai tujuan tujuan yang telah ditentukan
- b. Willian H. Newman : *Administration is guidance, leadership and control of the efforts of a group of individuals toward some common goal.* (Administrasi adalah membimbing, memimpin dan mengontrol usaha – usaha sekelompok orang u ntuk mencapai tujuan bersama).
- c. Munawardi Reskohadiprawiro : administrasi berarti tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta menentukan fakta – fakta secara tertulis, dengan tujuan memperoleh pandangan yang

menyeluruh serta hubungan timbal balik antara suatu fakta dengan fakta yang lainnya.

- d. G. Kartasaputra : Administrasi adalah suatu alat yang dapat dipakai menjamin kelancaran dan keberesan bagi setiap manusia untuk melakukan perhubungan, persetujuan, dan perjanjian atau lain sebagainya antara sesama manusia dan atau badan hokum yang dilakukan secara tertulis.
- e. Harris Muda : administrasi adalah suatu pekerjaan yang sifatnya, mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan tulis menulis, surat menyurat dan mencatat (pembukuan) setiap perubahan aau kejadian yang terjadi di dalam organisasi itu.
- f. Dwight Wakdo : administrasi adalah bentuk daya upaya manusia yang cooperative, yang mempunyai tingkat rasionalite yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas dan definisi – defisnisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat dirinci beberapa pokok untuk disebut sebagai administrasi, diantaranya :

1. Sekolompok orang, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang
2. Kerja sama, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih bekerja sama dalam pencapaian tujuan
3. Pembagian kerja, artinya kegiatan administrasi bukan sekedar kegiatan kerja sama, melainkan kerja sama tersebut harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas

4. Kegiatan yang nuntut dalam suatu proses, artinya kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan – tahapan tertentu secara berkesinambungan
5. Tujuan, artinya sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerja sama

Alberth Lepawsky (1966), menunjukan enam peran administrasi dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat.

a. *The universal importance of administration*

Bahwa administrasi sebagai studi ilmiah yang serius diperhatikan dari disintegrasi bagi kurangnya abilitas administratif (administrative ability) dan efesiensi manajerial (manajerial efficiency) terutama pada perioda hingga PD II. Fayol menyatakan, memlalui pengetahuan administrasi kita mengerti perencanaan, organisasi, komando, koordinasi, kontrol, yang menjadi dasar – dasar untuk tenaga kerja (workman). Dengan demikian, setiap orang mempunyai kebutuhan akan administrasi, sehingga administrasi adalah satu subjek dari kepentingan universal.

b. *The stabilizing role of administration in society*

Meskipun para penulis sepakat akan pentingnya administrasi tapi ada perbedaan pendapat tentang derajat kepentingan. Paul Pigors menganggap, bahwa fungsi primen adminitrasi adalah untuk stabilisasi intitusi – institusi sosial.

c. *The role administration in social change*

Brook Adam mengatakan, bahwa fungsi pokok dari administrasi adalah menjadi stabilitas sosial dengan menyediakan fasilitas bagi perubahan sosial

d. *The threat a managerial revolution*

Pandangan James Burnham, bahwa kualitas esesial dari emerging society adalah dalam hal karakter manajemennya; bahwa dalam kenyataan manajer – manajer mempunyai kesiapan untuk taken over masyarakat modern

e. *The prospect of managerial evolution*

Charles Merriem mengatkui, bahwa lambat laun akan diberikan atribut posisi manajer dari satu masyarakat demokratik. Ia menyebut organ pemerintahan tidak lain merupakan organ manajerial.

f. *Administration as the key to modern society*

Charles A. Beard mengatakan, masyarakat modern adalah masyarakat besar. Setiap perusahaan dalam masyarakat besar atau masyarakat modern tenang dibawah administrasi. Administrasi merupakan kunci untuk pengabdian kekuadaan dalam masyarakat besar.

Dalam sebuah administrasi tentunya terdapat proses yang perlu dilakukan, William H. Newman berpendapat: Salah satu jalan untuk menganalisa administrasi adalah berpikir apa yang dapat dikerjakan oleh seorang administrator. Berdasarkan pendekatan ini pekerjaan dari administrator dapat dibagi menjadi 5 proses dasar:

1. *Planning* : menentukan apa yang akan dikerjakan. Ini meliputi besar kecilnya akibat keputusan perencanaan tersebut, tujuan yang harus jelas, kemantapan dari kebijaksanaan tersebut, program yang matang, menentukan metode dan prosedur khusus dan menentukan jadwal.
2. *Organizing* : menggolong–golongkan aktivitas yang perlu (sesuai rencana untuk mencapai tujuan) ke dalam unit–unit administrasi. Selain itu juga

menentukan hubungan atasan dan bawahan dalam setiap unit. Masalah-masalahnya antara lain, bagaimana mengadakan departemen-departemen (asas departmentation).

3. *Assembling resources* : Mengatur sumber – sumber yang terdiri dari orang-orang, biaya – biaya dan fasilitas – fasilitas lain agar rencana dapat direalisasikan.
4. *Directing* : memberi perintah – perintah, harus jelas siapa yang diberi perintah dan tanggung jawab atas setiap bagian dari rencana tersebut.
5. *Controlling* : melihat dan mengusahakan agar seluruh kegiatan-kegiatan menuju sedekat mungkin dengan rencana.

2.1.2.2 Pengertian Administrasi Publik

Banyak para ahli yang memberikan definisi pada Administrasi Publik diantaranya sebagai berikut :

Menurut John M. Priffner dan Robert V. Presthus dalam buku Inu Kencana Syafie (2020) menyatakan bahwa :

- a. *Public administration involves the implementation of public policy which has been determine by representative political bodies* (Administrasi Publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan – badan perwakilan politik)
- b. *Public administration may be defined as the coordination of individual ang group effort to carry out public policy. It is mainly accupied with the daily work of governments* (Administrasi Publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari – hari pemerintah.

c. *In sum public administration is a process concerned with carrying out public policies, encompassing, innumerable skills and techniques larga numbers of people* (secara global Administrasi Publik adalah suatu proses yang tbersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan – kebijaksanaan pemerintah, pengarahan, kecakapan, dan teknik – teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang).

Sedangkan menurut **Felix A. Nigro** dan **Lloyd G. Nigro** menyatakan pengertian dari administrasi publik, yaitu :

1. (Public Administration) is cooperative group effort in public setting.
(Administrasi Publik) adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan
2. (Public Administration) covers all there branches: executive. Legislative, and judicial, and their interrelationships. (Administrasi Publik) meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan di antara mereka.
3. (Public Administration) has an important role formulating of public policy and is this a part of the political process. (Administrasi Publik) mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.
4. (Public Administration) is cosely associated with numerous private group and individuals in providing services to the community. (Administrasi Publik) sangat erat berkaitan dengan berbagai macam

kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat

5. (Public Administration) is different in significant ways from private administration. (Administrasi Publik) dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Menurut George J. Gordon menyatakan bahwa :

“administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atas pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta pengadilan”.

H.A Simon dalam bukunya *Public Administration* yang dikutip oleh Handayani (2002: 2), memberikan definisi administrasi sebagai kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerja untuk menyelesaikan tujuan bersama. Pengertian Administrasi Negara yang dikutip Prajudi Atmosudirjo (1982: 272) dalam buku *Administrasi dan Manajemen Umum* mengatakan “administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan – tujuan yang bersifat kenegaraan.”

Menurut Surie (1986) yang dikutip oleh Oktarina (2021) menjelaskan bahwa “Administrasi Publik atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan Negara dan etika mengatur penyelenggaraan negara.”

Menurut Marone, administrasi publik merupakan aspek bidang administrasi yang lebih luas dan berada dalam sistem politik guna mencapai tujuan serta sasaran yang dirumuskan oleh pengambilan keputusan politik. Hal ini juga dikenal sebagai

administrasi pemerintah karena ada sifat publik dalam kata administrasi publik berarti pemerintahan. Oleh karena itu, fokus administrasi publik adalah pada birokrasi publik, yaitu organisasi birokrasi pemerintah. (Oktarina (2021))

Gerald F. Caiden dalam bukunya *Public Administration* memberikan patokan bahwa untuk menentukan apakah suatu organisasi tersebut termasuk pemerintah, adalah dengan melihat tiga hal yaitu organisasinya dibentuk dengan peraturan pemerintah, karyawannya disebut pegawai negeri, dan pembiayaannya berasal dari uang rakyat.

Namun demikian ada tujuh hal khusus dari Administrasi Publik, yaitu tidak dapat dielakkan (*unavoidable*), senantiasa mengharapkan ketaatan (*expect abedience*), mempunyai prioritas (*has priority*), mempunyai pengecualian (*has exceptional*), puncak pimpinan politik (*top management political*), sulit diukur (*difficult to measure*), sehingga kita terlalu banyak mengharap dari Administrasi ini (*more is expected of public administration*).

Untuk menjalankan tugas – tugas pelayanan publik, administrasi publik memang perlu dilekati dengan fleksibilitas melalui kewenangan diskresi. Hal itu sebagai konsekuensi logis agar proses penyediaan publik tidak terhambat oleh banyak prosedur dan regulasi, terutama atas kepentingan umum yang mendesak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, haruslah tindakan – tindakan administrasi publik tersebut sesuai dengan hukum. Hal ini berarti, dalam menjalankan tugasnya secara aktif administrasi publik harus dapat menjaga dan menjamin bahwa tindakan – tindakannya tidak melanggar hak dan kewajiban asasi manusia (Syahrhan Basah, 1985).

2.1.3 Kajian Terhadap *Middle Theory*

Middle theory adalah teori yang berada pada level mezo atau menengah, yang dimana fokus kajiannya adalah makro dan mikro. Middle theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Efektivitas Program Middle theory dimulai dengan fenomena empiris dan mengabstraksikannya menjadi pernyataan umum yang dapat diverifikasi oleh data. Middle theory berperan sebagai jembatan antara teori dasar dan implementasi praktis dalam menilai efektivitas suatu program. Teori ini memberikan pendekatan yang lebih spesifik dan kontekstual dalam menganalisis keberhasilan kebijakan atau intervensi, terutama dalam menghubungkan konsep fundamental dengan variable–variabel yang berpengaruh di lapangan. Dengan middle theory, Efektivitas program dapat dilakukan secara lebih terarah dan aplikatif, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor – faktor yang menentukan efektivitasnya.

2.1.3.1 Pengertian Efektivitas

Dari segi etimologi, kata "efektif" yang digunakan di Indonesia memiliki asal – usul dari bahasa Inggris, yaitu berasal dari kata "effective". Makna dari kata ini adalah berhasil atau suatu tindakan yang dilakukan dengan baik. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "efektivitas" memiliki beberapa interpretasi, seperti akibat, pengaruh, kesan, manjur, dan dapat membawa hasil. Dalam kamus ilmiah populer, efektivitas diartikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil yang berguna, serta mendukung pencapaian tujuan.

Sebuah organisasi dianggap efektif ketika berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, efektivitas mencakup pencapaian tujuan

organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebuah organisasi dianggap efektif jika mampu memenuhi kepuasan pelanggan, mencapai visi organisasi, memenuhi aspirasi, menghasilkan keuntungan, mengembangkan sumber daya manusia, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar organisasi.

bahwa: Definsi menurut Subagyo (2000) dalam Budiani (2009) mengemukakan

"Efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadssn yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu pperbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya."

Berdasarkan definisi tersebut efektivitas dapat didefinisikan sebagai kesesuaian antara output suatu tindakan atau kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, efektivitas terjadi ketika hasil dari suatu tindakan sesuai dengan apa yang diinginkan atau diharapkan. Jika seseorang melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu dan tindakan tersebut mencapai hasil atau akibat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki sebelumnya, maka tindakan tersebut dapat dikatakan efektif. Dengan kata lain, efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu tindakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut (Steers *et al.*, n.d.) dalam bukunya Efektivitas Organisasi, Mengemukakan bahwa:

"Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumberdaya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber day aitu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaanya."

Berdasarkan pemaparan diatas definisi efektivitas yang disajikan menyoroti pentingnya keselarasan antara upaya yang dilakukan, sumber daya yang digunakan, dan hasil yang dicapai dalam sebuah program atau sistem. Dalam konteks ini, efektivitas dilihat sebagai kemampuan suatu program untuk mencapai tujuan dan sasarnya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa memberikan tekanan yang tidak wajar pada pelaksanaannya. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan serta memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan cara yang tepat dan tanpa membebani sumber daya secara berlebihan. Dengan demikian, definisi ini menyoroti pentingnya pengelolaan yang bijaksana dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sistem dan mencapai efektivitas.

(Sedarmayanti *et al.*, n.d.) dalam bukunya Sumber Daya dan Produktivitas Kerja(2009:59) yaitu:

"Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat."

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa definisi tersebut menyoroti perbedaan antara efektivitas dan efisiensi dalam konteks pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan seberapa baik sebuah program atau tindakan mencapai tujuan yang ditetapkan, dengan fokus pada hasil atau keluaran yang dihasilkan. Sementara itu, efisiensi lebih menekankan pada penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai tujuan tersebut.

Pentingnya memahami perbedaan ini adalah bahwa meskipun sebuah program dapat mencapai tujuan yang ditetapkan (efektif), itu tidak selalu berarti bahwa program tersebut menggunakan sumber daya dengan cara yang paling efisien. Dalam konteks ini, efisiensi dan efektivitas bisa berjalan beriringan, tetapi tidak selalu terjadi demikian. Meningkatkan efektivitas mungkin tidak selalu berdampak pada peningkatan efisiensi, karena perhatian utamanya adalah pada hasil yang dicapai daripada pada penggunaan sumber daya.

efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu dalam jumlah sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjuk keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sarana yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sarana kegiatan, berarti makin tinggi efektivitasnya. (Siagian *et al.*, n.d.)

Berdasarkan uraian di atas bahwa efektivitas menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa yang diinginkan. Efektivitas dilihat dari seberapa baik hasil kegiatan mendekati atau sesuai dengan sarana yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hasil kegiatan mendekati atau bahkan melebihi sarana yang telah ditetapkan, maka itu menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi.

Pendekatan ini mempertimbangkan hubungan antara input (sumber daya yang digunakan) dan output (hasil yang dicapai), dengan mengukur efektivitas berdasarkan seberapa efisien sumber daya yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang

sumber daya yang tersedia dan kemampuan untuk memanfaatkannya dengan optimal sangat penting untuk mencapai efektivitas yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan atau program.

Berdasarkan pemaparan teori para ahli diatas maka efektivitas adalah kesesuaian antara output suatu tindakan atau program dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Ini mencerminkan kemampuan sebuah program untuk mencapai tujuan dan sasaraannya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa memberikan tekanan yang tidak wajar pada pelaksanaannya. Dalam konteks ini, efektivitas dilihat dari seberapa baik hasil kegiatan mendekati atau sesuai dengan sarana yang telah ditetapkan sebelumnya. Penting untuk memahami perbedaan antara efektivitas dan efisiensi, di mana efektivitas menekankan hasil yang dicapai, sementara efisiensi lebih fokus pada penggunaan sumber daya secara optimal.

2.1.3.2 Pengertian Program

Program merupakan perencanaan yang disusun oleh individu atau kelompok untuk mencapai prinsip yang telah ditetapkan sebelumnya. Program dapat dinisiasi berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan, kemudian dimplementasikan dalam bentuk program tertentu

Kata "program" berasal dari Bahasa Inggris, yaitu "Prorame," yang memiliki makna rencana atau acara. Dalam konteks konseptual, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "program" diartikan sebagai susi rancangan yang melibatkan asas dan saha yang akan dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu.

Program adalah produk dari perencanaan yang berisi kegiatan atau rangkaian kegiatan berdasarkan perencanaan yang bersumber dari data yang valid dan memadai untuk menghasilkan capaian dan rencana yang telah disusun. Capaian dan rencana yang dimaksud tentunya memiliki suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan program (Purwanto *et al.*, n.d.)

Berdasarkan pemaparan teori di atas bahwa program adalah hasil dari perencanaan yang didasarkan pada data valid dan memadai. Program ini terdiri dari kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan program. Dengan kata lain, perencanaan yang baik dan berbasis data sangat penting untuk menghasilkan program yang efektif dan sesuai dengan tujuannya.

Perumusan program kerja merupakan peruncian daripada suatu rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk kegiatan, Menurut (Siagian *et al.*, n.d.) dalam bukunya “Manajemen Sumber Daya Manusia”

Berdasarkan pendapat di atas menjelaskan bahwa program kerja adalah rincian dari suatu rencana besar, khususnya dalam konteks pembangunan nasional. Program kerja ini mencakup berbagai kegiatan spesifik yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas, Siagian menekankan bahwa perumusan program kerja adalah langkah penting untuk mengubah rencana strategis menjadi tindakan konkret dan terukur. Hal ini menunjukkan pentingnya detail dan perencanaan yang sistematis dalam memastikan bahwa tujuan

pembangunan nasional dapat dicapai melalui implementasi kegiatan yang terstruktur dan tepat sasaran.

Menurut Adisaputre (2010:89) mendefinisikan program kerja sebagai

"Program kerja atau rencana kerja adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta sebagai keterangan mengenai tolak ukurnya, dalam rangka mencapai hasil. Rencana digunakan manajemen untuk pedoman pengarahan kegiatan dan juga sebagai titik tolak proses pengendalian."

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa program kerja sebagai hasil dari proses perencanaan yang mendetail, mencakup berbagai elemen penting seperti jenis kegiatan, pelaksana, lokasi, jadwal, sumber daya yang akan digunakan, dan tolok ukur untuk evaluasi hasil. Program kerja ini berfungsi sebagai panduan bagi manajemen dalam mengarahkan kegiatan serta sebagai dasar untuk proses pengendalian. Dengan adanya program kerja yang terstruktur, organisasi dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian hasil yang diinginkan.

Berdasarkan teori para ahli di atas, maka program adalah produk dari perencanaan yang berdasarkan data yang valid dan memadai. Ini melibatkan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan program. Perencanaan program merupakan perincian dari rencana besar, yang mencakup berbagai macam kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Program ini menyertakan.

Elemen – elemen seperti jenis kegiatan, pelaksana, lokasi, jadwal, sumber daya yang digunakan, dan tolok ukur untuk evaluasi hasil. Keseluruhan, program

kerja berfungsi sebagai panduan bagi manajemen dalam mengarahkan kegiatan dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan adanya program kerja yang terstruktur, organisasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai hasil yang diinginkan.

2.1.3.3 Pengertian efektivitas Program

Efektivitas program menjadi kriteria untuk menilai sejauh mana sebuah program berjalan dengan hasil yang dianggap efektif. Evaluasi ini mempertimbangkan sejauh mana usaha dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan. Dalam konteks efektivitas program, terdapat tingkat keberhasilan yang diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan hasil nyata yang telah dicapai. Namun, apabila tujuan dari rencana dan tindakan tidak tercapai, hal tersebut dianggap sebagai ketidak efektifan program.

Makmur (2015:7) berpendapat tentang unsur dari efektivitas sebagai berikut: Unsur – unsur efektivitas antara lain:

1. Ketepatan penentuan waktu
2. Ketepatan perhitungan biaya
3. Ketepatan dalam pengukuran
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan
5. Ketepatan berpikir
6. Ketepatan dalam melakukan perintah
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan
8. Ketepatan sasaran

Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti beranggapan bahwa Efektivitas memiliki beberapa unsur seperti ketepatan waktu. Ketepatan perhitungan biaya ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan dan ketepatan sasaran. Eketivitas akan tercapai apabila unsur – unsur tersebut dapat diperhatikan

Ditjen Binlantas Depnaker, 1993, dalam (Setiawan 1998) bahwa:

"Efektivitas program adalah suatu penilaian terhadap Tingkat kesesuaian program yang merupakan salah satu cara dalam upaya untuk mengukur sebuah efektivitas pada suatu program. Efektivitas pada sebuah program ini dapat diketahui yaitu dengan membandingkan tujuan program dengan ouput dari program."

Berdasarkan pendapat diatas menjelaskan bahwa efektivitas sebuah program diukur dengan mengevaluasi sejauh mana program tersebut mencapai tujuannya. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antara tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang diperoleh dari program tersebut. Dengan demikian, efektivitas program dapat dinilai berdasarkan sejauh mana kesesuaian antara tujuan dan output yang dihasilkan.

Adapun menurut Rini dan Indah yang dikutip dari Hariani (2017:4)

“Bahwa Efektivitas program merupakan cara untuk mengukur kesesuaian program dengan tujuan”

Berdasarkan perndapat diatas peneliti beranggapan bahwa efektivitas program adalah suatu metode untuk menilai sejauh mana program tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas program diukur

berdasarkan tingkat kesesuaian antara apa yang direncanakan (tujuan) dan apa yang dicapai oleh program tersebut.

Definisi Efektivitas menurut Subagyo (2000) dalam Bodiani (2009) mengemukakan bahwa:

"Efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya."

Berdasarkan pemaparan teori diatas, maka efektivitas adalah kesesuaian antara hasil yang dihasilkan (output) dengan tujuan yang telah ditetapkan. Definisi ini menekankan bahwa efektivitas terjadi ketika hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Lebih lanjut, efektivitas juga didefinisikan sebagai suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki, yang mengindikasikan bahwa keberhasilan suatu tindakan atau program tidak terjadi secara kebetulan, melainkan karena adanya kesadaran dan usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, efektivitas sebuah tindakan atau program dapat dinilai berdasarkan sejauh mana hasilnya sesuai dengan tujuan yang dikehendaki sebelumnya.

2.1.3.4 Indikator Efektivitas Program

Menurut Campbell JP (1989:47) menjelaskan bahwa efektivitas program dapat dijalankan berdasarkan dengan kemampuan operasionalnya dalam melaksanakan program yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya., secara komprehensif sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai Tingkat kemampuan suatu lembaga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya. Maka dalam mewujudkan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya diperlukan pengukuran efektivitas yang relevan yakni menurut Campbell dalam Mutiarin (2014):

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan Sasaran
3. Kepuasan Terhadap Program
4. Kesesuaian Input dan Output
5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Sedangkan menurut Budiani dalam Pertiwi dan Nurcahyanto (2017) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan karakteristik sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program Berkenaan dengan sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
 2. Sosialisasi program Berkenaan dengan kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga ehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
 3. Tujuan program Berkenaan dengan sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
 4. Pemantuan program Berkenaan dengan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program
- Berdasarkan karakteristik efektifitas diatas dapat diartikan dalam

pemahaman program dilihat untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami program talu daqut dalam tepat sasaran dilihat dari bagaimana pemerintah merealisasikan programs ini kepada masyarakat sebagai sasaran. Selain itu, dalam tenagainya tujuan dilihat melahi pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan, baik melalui pelatihan program maupun kegiatan lainnya.

2.1.4 Kajian Terhadap *Operasional Theory*

Operasional Theory adalah teori yang menjelaskan cara kerja suatu perangkat atau sistem. Teori ini sering dimaksudkan kedalam sebuah dokumentasi, terutama dokumentasi pemeliharaan atau layanan dan panduan pengguna, untuk memfasilitasi pemecahan masalah dengan memberikan panduan tentang bagaimana perangkat atau sistem berfungsi dengan seharusnya.

Operational Theory merupakan pendekatan yang menjelaskan bagaimana suatu sistem, kebijakan, atau program bekerja dalam praktiknya. Teori ini digunakan untuk menilai efektivitas program dibidang ekonmi kreatif dengan cara menganalisis implementasi program serta hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas suatu program sangat bergantung pada sejauh mana tujuan yang telah dirancang dapat diwujudkan serta dampak yang diberikan kepada penerima manfaat.

Efektivitas program diukur berdasarkan indikator tertentu yang menunjukkan sejauh mana program telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ni Wayan Budiani Dalam Pertiwi Dan Nurcahyanto (2019:3) menyatakan bahwa efektivitas program dapat dinilai melalui empat variabel utama,

yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan, dan pemantauan program.

Budiani dalam Pertiwi dan Nurcahyanto (2017:3) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) variabel – variabel sebagai berikut ::

1. Ketepatan sasaran program, yaitu berkenaan dengan sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Suatu program dibuat harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, dikatakakan tepat sasaran jika program dan kebutuhan masyarakat selaras.

Dalam dimensi ini terdapat indikator didalamnya yaitu :

- a. Mencapai Sasaran Yang Tepat
- b. Sesuai Kebutuhan Masyarakat

2. Sosialisasi program, yaitu berkenaan dengan kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program.

Dalam dimensi ini terdapat indikator didalamnya yaitu :

- a. Arahan Yang Optimal Kepada Masyarakat
- b. Tersampaikan Kepada Masyarakat

3. Tujuan program, yaitu berkenaan dengan sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam dimensi ini terdapat indikator didalamnya yaitu :

- a. Kesesuaian Antara Pelaksana Program Dan Tujuan Program
 - b. Hasil Pelaksanaan Program
4. Pemantuan program, yaitu berkenaan dengan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Dalam dimensi ini terdapat indikator didalamnya yaitu :

- a. Controlling
- b. Evaluasi.

Selain itu, Campbell JP (1989) mengembangkan model efektivitas program yang menilai keberhasilan program berdasarkan indikator

- a) Keberhasilan sasaran
- b) Kepuasan terhadap program
- c) Keseimbangan antara input dan output

Model ini menekankan bahwa efektivitas suatu program tidak hanya diukur dari pencapaian target tetapi juga dari dampak yang diberikan kepada peserta program.

Efektivitas Program Patrakomala tidak hanya berfokus pada bantuan finansial, tetapi juga mencakup pelatihan, akses pasar, serta penguatan ekosistem bisnis yang lebih kompetitif. Tambunan (2011) menyatakan bahwa Program Patrkomala yang efektif harus mencakup regulasi yang fleksibel, ekosistem bisnis yang kuat, serta pendidikan kewirausahaan agar pelaku usaha mampu berinovasi dan bersaing secara global.

Mardikanto dan Soebianto menambahkan bahwa efektivitas Program Patrakomala dapat dinilai melalui empat aspek utama, yaitu:

1. Bina Manusia, yang berfokus pada peningkatan kapasitas individu dalam mengelola usaha.
2. Bina Usaha, yang berkaitan dengan pengembangan usaha melalui akses pasar dan modal.
3. Bina Lingkungan, yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.
4. Bina Kelembagaan, yang bertujuan untuk memperkuat kelembagaan pelaku ekonomi agar lebih berkelanjutan.

Muasaroh (2010) menyatakan bahwa efektivitas suatu program dapat dinilai dari aspek tugas atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan dan peraturan, serta aspek tujuan atau kondisi ideal. Jika suatu program dapat menjalankan tugasnya dengan baik, memiliki perencanaan yang matang, menaati regulasi yang ada, serta mencapai kondisi ideal yang diharapkan, maka program tersebut dapat dikatakan efektif. Namun menurut Haris (2010) menambahkan bahwa efektivitas program dapat diukur melalui empat indikator utama, yaitu:

1. Tingkat kualitas, yang menunjukkan sejauh mana program memberikan manfaat bagi peserta.
2. Tingkat kuantitas, yang menunjukkan jumlah peserta yang mendapatkan manfaat.
3. Tingkat dampak, yang menunjukkan seberapa besar perubahan yang terjadi akibat program.

4. Tingkat waktu, yang menunjukkan ketepatan waktu dalam pelaksanaan program.

Model efektivitas program menurut Budiani dalam Pertiwi dan Nurcahyanto (2017:3) juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan Program Partakomala dengan melihat indikator keberhasilan program secara Ketepatan sasaran program, Sosialisasi program, Tujuan program, Pemantauan program.

Dengan menggunakan berbagai indikator efektivitas dari Budiani, Muasaroh, Haris, dan Mardikanto, efektivitas Program Partakomala dapat terus ditingkatkan melalui langkah-langkah strategis seperti penyempurnaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi berkala, serta pendampingan teknis yang lebih intensif. Dengan pendekatan yang tepat, program ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pelaku ekonomi di Kota Bandung.

2.2 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variable-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.

Kerangka berpikir merupakan perlengkapan peneliti untuk menganalisa perencanaan dan berargumentasi kecenderungan asumsi ke mana akan dilabuhkan, penelitian kuantitatif kecenderungan akhirnya adalah diterima atau ditolak hipotesis

penelitian tersebut, sedangkan penelitian yang berebentuk pernyataan atau narasi–narasi peneliti bertolak dari data dan memanfaatkan teori yang digunakan sebagai bahan penjelasan dan berakhir dengan pembaharuan suatu pernyataan.

Pada penelitian ini, peneliti mendasari kerangka berpikir dari sebuah teori yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani Dalam Pertiwi Dan Nurcahyanto (2019:3) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) variabel–variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran program, yaitu berkenaan dengan sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Suatu program dibuat harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, dikatakakan tepat sasaran jika program dan kebutuhan masyarakat selaras.

Dalam dimensi ini terdapat indikator didalamnya yaitu :

- a. Mencapai Sasaran Yang Tepat
- b. Sesuai Kebutuhan Masyarakat

2. Sosialisasi program, yaitu berkenaan dengan kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program.

Dalam dimensi ini terdapat indikator didalamnya yaitu :

- a. Arahan Yang Optimal Kepada Masyarakat
- b. Tersampaikan Kepada Masyarakat

3. Tujuan program, yaitu berkenaan dengan sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam dimensi ini terdapat indikator didalamnya yaitu :

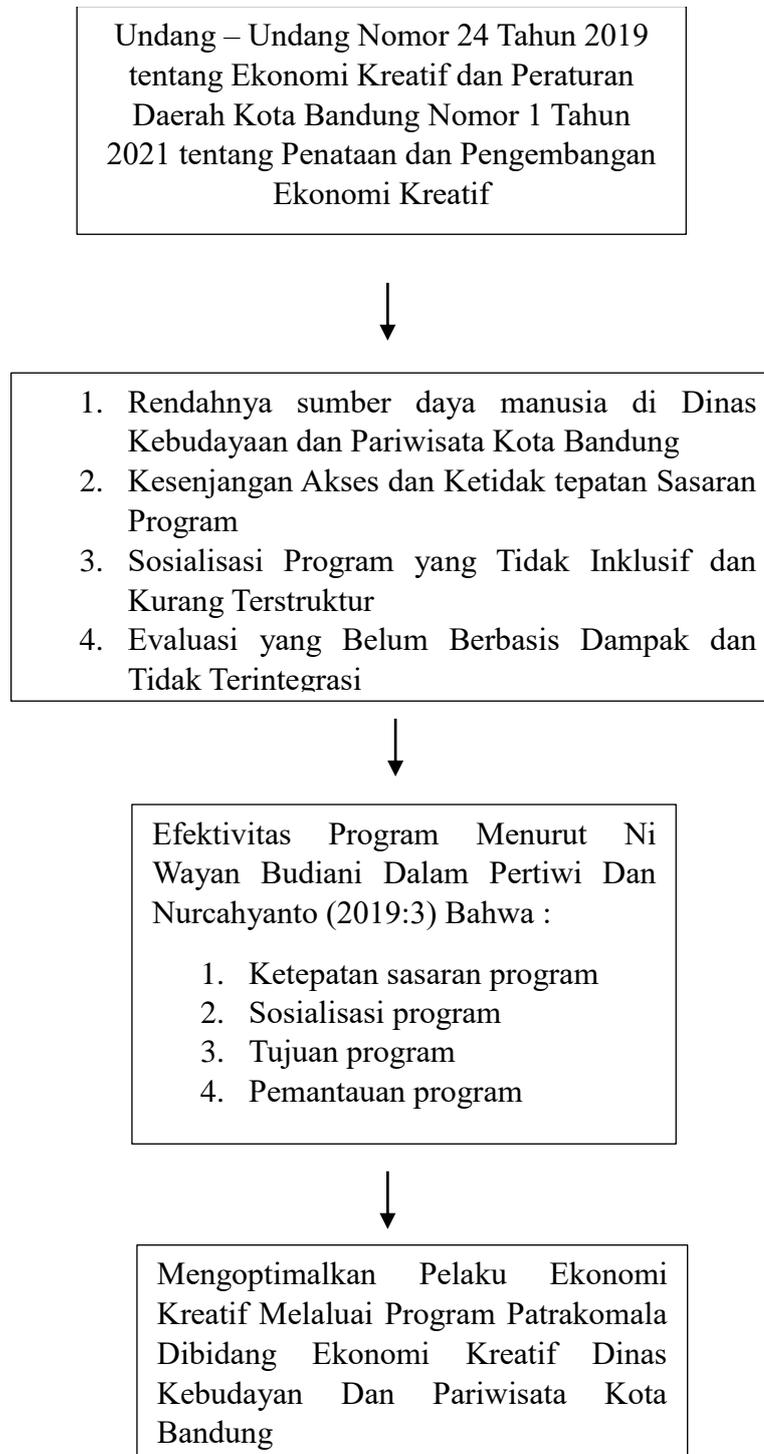
- a. Kesesuaian Antara Pelaksana Program Dan Tujuan Program
 - b. Hasil Pelaksanaan Program
4. Pemantuan program, yaitu berkenaan dengan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Dalam dimensi ini terdapat indikator didalamnya yaitu :

- a. Controlling
- b. Evaluasi

Diagram Kerangka Berfikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Sumber : Peneliti Tahun 2025

2.3 Proposisi

Dengan menerapkan dimensi Efektivitas Program yaitu Ketepatan sasaran program, Sosialisasi program, Tujuan program, Evaluasi program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung dapat memberikan mengoptimalkan pelaku ekonomi kreatif melalui platform partakomala.